

BAB 3

GAMBARAN PROFIL PAJAK REKLAME KOTA DEPOK

Sekilas gambaran umum atas kondisi kota Depok, khususnya perkembangan perekonomian, diperlukan untuk memahami upaya pemungutan, perkembangan penerimaan dan kapasitas pajak reklame di Kota Depok.

Untuk itu bab ini akan mengulas secara sekilas tentang kondisi perekonomian Kota Depok, perkembangan penerimaan pajak reklame papan, billboard dan megatron, serta keadaan organisasi pada instansi yang terkait dengan pengelolaan pajak reklame di Kota Depok yaitu Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan (DPPK) Kota Depok, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.

3.1 Kondisi Perekonomian Kota Depok

PDRB per kapita Kota Depok, menurut harga berlaku, pada tahun 2004 mencapai Rp4.862.361,24. PDRB per kapita tahun 2008 dibandingkan pada tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp8.369.131,29. PDRB per kapita Kota Depok menurut harga berlaku dan menurut harga konstan mengalami peningkatan untuk kurun waktu lima tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.1
PDRB per Kapita Kota Depok Tahun 2004-2008

Tahun	Menurut Harga Berlaku (Rp)	Menurut Harga Konstan (Rp)
2004	4.862.361,24	3.385.720,44
2005	5.569.813,08	3.508.084,49
2006	6.435.596,73	3.620.579,94
2007	7.318.250,87	3.744.180,58
2008	8.369.131,29	3.850.653,21

Sumber: BPS Kota Depok

Nilai PDRB pada tahun 2008 menurut harga berlaku ialah 12.542.499,04 melebihi nilai PDRB pada tahun 2004 yaitu 6.377.711,26. Kenaikan PDRB menunjukkan telah terjadi peningkatan kegiatan perekonomian, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat, yang ditandai dengan peningkatan PDRB per kapita. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari sudut pandang produsen merupakan pangsa pasar yang potensial untuk produk dan jasa para produsen. Sehingga akan besar kebutuhan untuk mempromosikan produk dan jasa para produsen tersebut, dengan menggunakan media reklame. Peningkatan PDRB dan tingkat inflasi di Kota Depok terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
PDRB dan Tingkat Inflasi di Kota Depok Tahun 2004-2008

Tahun	PDRB menurut harga berlaku (juta rupiah)	Pertumbuhan PDRB (%)	PDRB menurut harga konstan (juta rupiah)	Pertumbuhan PDRB (%)	Inflasi (%)
2004	6.377.711,26	13,77	4.440.876,83	6,50	6,11
2005	7.541.666,15	19,11	4.750.034,10	6,96	16,83
2006	9.005.066,64	19,40	5.066.129,06	6,65	7,33
2007	10.599.147,15	17,70	5.422.760,39	7,04	6,50
2008	12.542.499,04	18,33	5.770.827,64	6,42	11,7

Sumber: BPS Kota Depok

Laju pertumbuhan sektoral PDRB Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kota Depok Tahun 2004-2008

No	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
	A. PRIMER	4,24	4,70	-4,27	2,57	1,94
01.	Pertanian	4,24	4,70	2,64	2,43	2.31
02.	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
	B. SEKUNDER	6,94	8.03	6,44	5,11	6,91
03.	Industri pengolahan	7,27	9,00	7,15	4,49	7,15
04.	Listrik, gas dan air minum	5,66	7,86	3,03	3,48	4,25
05.	Bangunan/konstruksi	5,58	2,00	3,49	10,29	6,72
	C. TERSIER	6,21	5,98	7,73	9,45	6,19
06.	Perdagangan, hotel dan restoran	5,91	6,07	9,39	12,01	5,41
07.	Pengangkutan dan komunikasi	6,83	7,95	2,23	3,30	8,75
08.	Bank dan lembaga keuangan lainnya	10,32	6,64	2,80	9,14	4,42
09.	Jasa-jasa	4,83	3,94	8,04	3,87	8,64

Sumber: BPS Kota Depok

PDRB menurut harga berlaku bila dilihat dari distribusi pada sektor-sektor perekonomian untuk periode 2004-2008 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Distribusi Persentase PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Depok
Tahun 2004-2008

No	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
	A. PRIMER	3,21	2,99	2,64	2,43	2,31
01.	Pertanian	3,21	2,99	2,64	2,43	2,31
02.	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
	B. SEKUNDER	48,24	48,57	46,94	47,04	45,58
03.	Industri pengolahan	38,25	38,49	37,38	37,55	36,60
04.	Listrik, gas dan air minum	4,06	4,81	4,71	4,65	4,30
05.	Bangunan/konstruksi	5,94	5,27	4,84	4,84	4,67
	C. TERSIER	48,55	48,44	50,42	50,52	52,11
06.	Perdagangan, hotel dan restoran	30,37	30,37	32,19	33,12	34,67
07.	Pengangkutan dan komunikasi	6,33	6,81	6,81	6,42	6,61
08.	Bank dan lembaga keuangan lainnya	3,91	3,85	3,52	3,50	3,40
09.	Jasa-jasa	7,94	7,71	7,91	7,48	7,44

Sumber: BPS Kota Depok

Terlihat bahwa perekonomian Kota Depok pada tahun 2004 didominasi oleh tiga sektor yaitu: sektor industri pengolahan (38,25%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (30,37%) dan sektor jasa (7,94%), sedangkan pada tahun 2008 didominasi oleh: sektor sektor industri pengolahan (36,60%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (34,67%) dan sektor jasa (7,44%).

Jumlah penduduk Kota Depok juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2005-2009

Kecamatan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Sawangan	81.283	84.751	86.640	88.692	90.752
Pancoran Mas	126.080	129.790	139.814	143.153	146.506
Sukmajaya	153.930	157.198	175.033	179.361	183.682
Cimanggis	192.283	198.971	209.019	214.221	219.419
Beji	70.343	73.814	73.457	75.303	77.129
Limo	72.410	75.445	77.419	79.362	81.314
Kota Depok	696.329	719.969	761.382	780.092	798.802

Sumber: BPS Kota Depok

Dari tabel terlihat bahwa penambahan penduduk setiap tahun terus meningkat, pada tahun 2005 berjumlah 696.329 jiwa dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 798.802 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini menjadi sebuah peluang dengan adanya penambahan konsumen/pasar dan memberikan prospek yang baik untuk sektor reklame.

3.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame Papan, Billboard dan Megatron dan Kontribusi Pajak terhadap PAD

Penerimaan dari pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kota Depok, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2006-2009

(dalam juta rupiah)

Jenis PAD	2006		2007		2008		2009	
	Anggaran	% Pajak Daerah	Anggaran	% Pajak Daerah	Anggaran	% Pajak Daerah	Anggaran	% Pajak Daerah
Pajak Daerah	36.171,09	52,70	40.254,33	53,35	43.538,34	44,82	50.748,56	52,38
Retribusi Daerah	23.861,40	34,77	22.598,08	29,95	26.267,94	27,04	29.349,18	30,29
Bagian Laba Usaha Daerah	1.661,39	2,42	2.727,75	3,61	3.756,35	3,87	4.522,72	4,67
Lain-lain PAD yang sah	6.937,29	10,11	9.877,20	13,09	23.577,37	24,27	12.268,72	12,66
Jumlah	68.631,17		75.457,36		97.139,99		96.889,19	

Sumber: DPPK Kota Depok

Sedangkan kontribusi pajak dalam APBD Kota Depok Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel yaitu sebesar 52,38%. Penerimaan pajak daerah terdiri dari beberapa jenis pajak dengan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006-2009

(dalam rupiah)

Jenis Pajak Daerah	2006	2007	2008	2009
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
Pajak Hotel	1.238.628.869	1.433.568.696	1.658.480.431	2.715.727.219
Pajak Restoran	12.864.057.723	15.129.339.253	17.746.763.032	26.144.132.520
Pajak Hiburan	1.328.047.382	1.887.301.264	2.464.074.076	3.742.855.290
Pajak Reklame	2.561.925.436	2.802.234.350	4.316.077.876	6.056.947.306
Pajak Penerangan Jalan	19.338.375.703	19.819.728.787	20.701.221.970	29.382.754.087
Pajak Parkir	1.054.137.761	1.323.587.111	1.569.834.601	1.601.129.995
Jumlah	38.385.172.874	42.395.759.641	48.456.451.986	69.643.546.417

Sumber: DPPK Kota Depok

Terlihat bahwa kontribusi pajak reklame di tahun 2009 adalah sebesar Rp6.056.947.306,00 berada dibawah penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak restoran Hal ini disebabkan basis pajak reklame masih rendah. Adapun target dan penerimaan pajak reklame di Kota Depok untuk periode 2006-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Depok Tahun 2006-2009

Tahun	Target	Realisasi	%
2006	2.180.110.212	2.561.925.436	117,51
2007	3.008.990.000	2.802.234.350	93,13
2008	3.754.903.559	4.316.077.876	114,95
2009	4.970.180.000	6.056.947.306	121,87

Sumber: DPPK Kota Depok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame dua tahun terakhir mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. Namun di tahun 2007 mengalami tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini merupakan indikasi adanya peningkatan objek pajak baru dari tahun ke tahun. Secara rinci perbulan di tahun 2009 (tahun sebelumnya tidak diperoleh rinciannya secara lengkap hanya terdapat penerimaan untuk bulan januari hingga mei, dan agustus hingga desember karena keterbatasan data di Dinas Pendapatan Daerah) dapat digambarkan, sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Papan, Billboard dan Megatron
Kota Depok Periode Januari-Desember 2009

Bulan	Realisasi Penerimaan
1	2
Januari	276.115.358,00
Februari	463.183.128,00
Maret	361.153.535,00
April	367.331.310,00
Mei	418.114.940,00
Juni	415.265.109,00
Juli	468.736.257,00
Agustus	395.656.909,00
September	326.831.708,00
Oktober	347.811.793,00
Nopember	1.028.766.755,00
Desember	1.779.073.722,00

Sumber: DPPK Kota Depok

Di tahun 2009, penerimaan terbesar pada bulan Desember dan bulan Nopember dan penerimaan terkecil pada bulan Januari. Penerimaan terbesar di bulan Desember 2009 karena bagian Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Ruang dan Pemukiman melakukan sosialisasi di mall-mall seperti ITC Depok,

Depok Town Square dan Margo City ditujukan ke para pemilik kios, toko yang memasang reklame di dalam gedung mall namun tidak memiliki ijin pemasangan reklame dan tidak memperpanjang ijin pemasangan reklame.

3.3.1 Keadaan Organisasi Instansi Pengelola Pajak Reklame di Kota Depok

3.3.1 DPPK

DPPK sebagai pemungut pajak reklame memiliki jumlah pegawai tetap sebanyak 96 pegawai dan pegawai tidak tetap sebanyak 1 pegawai, yang bertugas menangani seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok. Latar belakang pendidikan pegawai DPPK seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Pegawai DPPK Kota Depok Menurut Pendidikan Tahun 2010

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	6
2	Strata 1 (S1)	39
3	Diploma (D3)	11
4	SLTA	41

Sumber : DPPK

Pegawai DPPK menurut pangkat dan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 11

Pegawai DPPK Kota Depok Menurut Pangkat dan Golongannya Tahun 2010

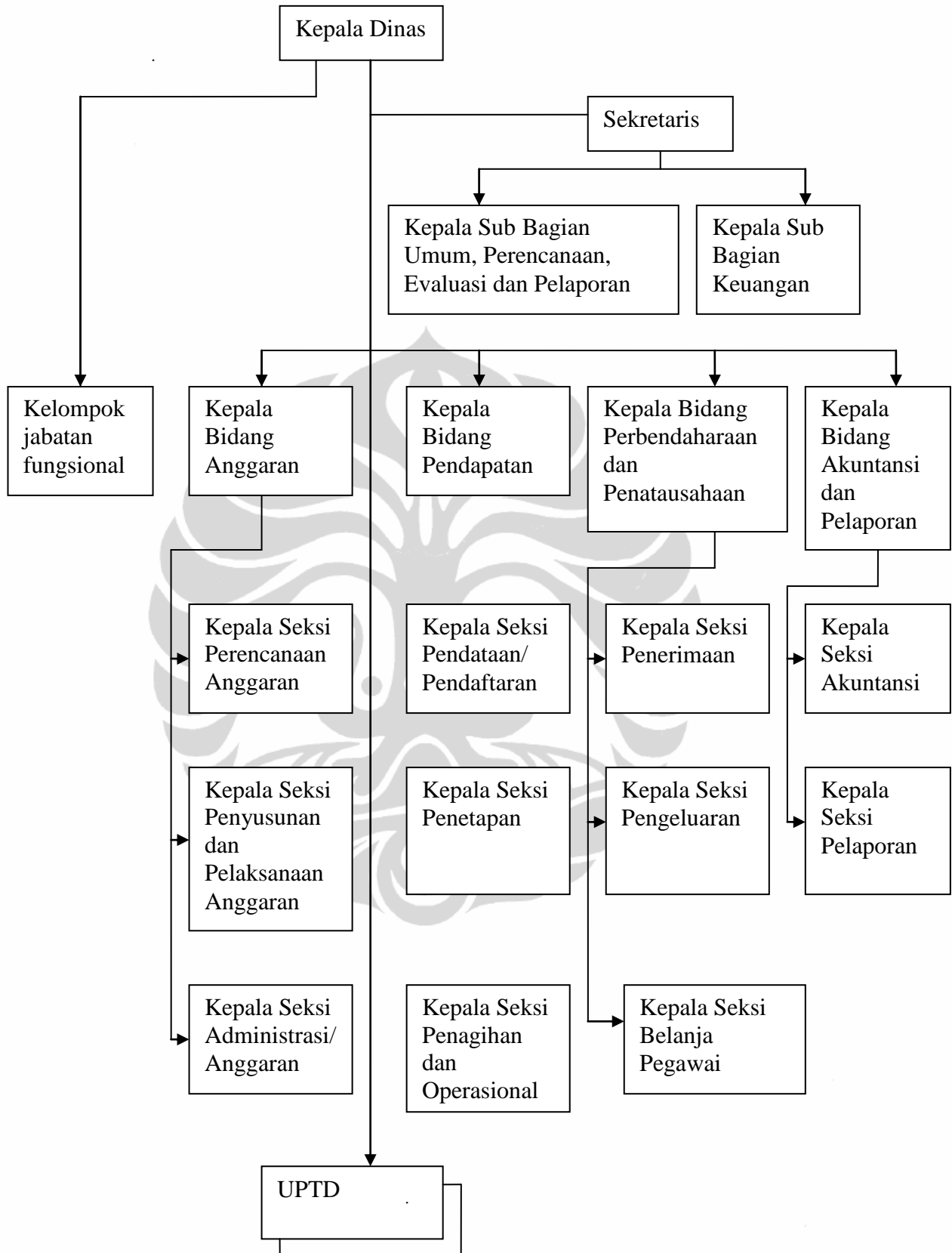
No	Golongan	Jumlah	Pangkat	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pembina Tk 1 IV/b	2	Kepala Dinas dan sekretaris	2
2	Pembina IV/a	3	Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Kabid Perbendaharaan dan Penatausahaan, serta Kepala Seksi Penerimaan	3
3	Penata Tk. I III/d	3	Kabid Pendataan, Kabid Anggaran, serta Kasie Penagihan dan Pengendalian Operasional	3
4	Penata III/c	5	Kasie Pelaporan, Kasubag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Kasubag Keuangan, Kasie Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, serta Kepala Seksi Pengeluaran	5
5	Penata Muda TK I III/b	12	Kasie Pendataan/Pendaftaran, Kasie Belanja Pegawai, Kasie Akuntansi, Kasie Administrasi Anggaran dan pelaksana	12
6	Penata Muda III/a	14	Pelaksana	14
7	Pengatur Tk. I II/d	2	Pelaksana	2
8	Pengatur II/c	3	Pelaksana	3
9	Pengatur Muda TK I II/b	16	Pelaksana	16
10	Pengatur Muda II/a	3	Pelaksana	3

Sumber : DPPK Kota Depok

Dari data tingkat pendidikan pegawai DPPK Kota Depok diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan belum terlalu memadai karena masih dominannya tingkat pendidikan SMA.

Struktur organisasi di DPPK ialah:





Gambar 3.1: Struktur Organisasi di DPPK Kota Depok

Sumber: DPPK Kota Depok

3.3.2 BPPT

BPPT sebagai instansi yang memberikan pelayanan perijinan diantaranya ijin pemasangan reklame, memiliki pegawai tetap sebanyak 46 pegawai, dengan komposisi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12
Pegawai BPPT Kota Depok Menurut Pendidikan Tahun 2010

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	6
2	Strata 1 (S1)	16
3	Diploma (D3)	6
4	SLTA	18

Sumber : BPPT Kota Depok

Pegawai BPPT menurut pangkat dan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Pegawai BPPT Kota Depok Menurut Pangkat dan Golongannya Tahun 2010

No	Golongan	Jumlah	Pangkat	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pembina Tk 1 IV/b	2	Kepala Dinas dan Kabag Tata Usaha	2
2	Pembina IV/a	2	Kabid Ijin Usaha, dan Kabid Pelayanan dan Penerbitan Ijin	2
3	Penata Tk. I III/d	-		-
4	Penata III/c	5	Kabid IPR dan Bangunan, Kasubag Umum & PEP, Kasubag Keuangan, dan Pelaksana	5
5	Penata Muda TK I III/b	3	Pelaksana	3

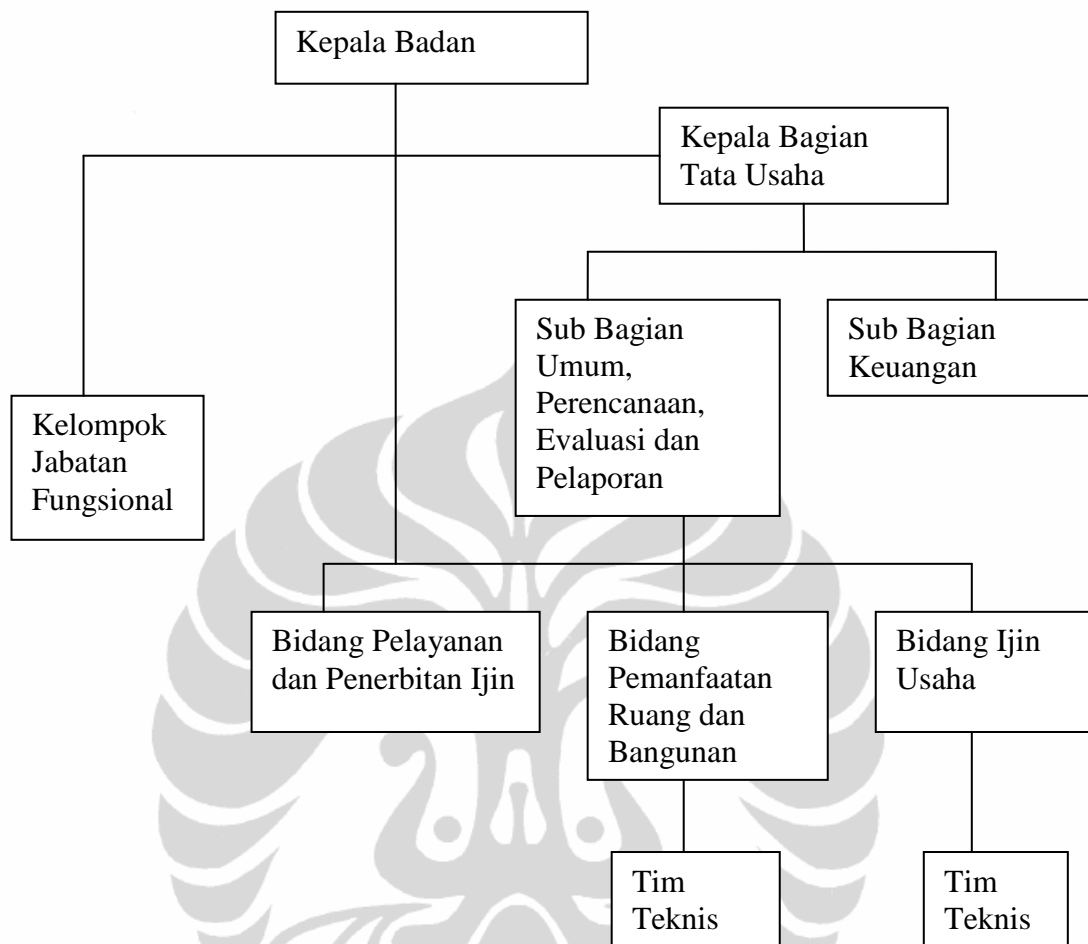
(Sambungan)

1	2	3	4	5
6	Penata Muda III/a	13	Pelaksana	13
7	Pengatur Tk. I II/d	3	Pelaksana	3
8	Pengatur II/c	9	Pelaksana	9
9	Pengatur Muda TK I II/b	8	Pelaksana	8
10	Pengatur Muda II/a	1	Pelaksana	1

Sumber : BPPT Kota Depok

Prasarana yang dimiliki oleh BPPT ialah kamera 1 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dengan 1 kendaraan untuk operasional sehari-hari, dan 2 kendaraan untuk Kepala Badan dan Sekretaris, serta 2 kendaraan roda 2.

Struktur Organisasi BPPT ialah:



Gambar 3.2: Struktur Organisasi di BPPT Kota Depok

Sumber: BPPT Kota Depok

3.3.3 Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Sementara Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagai instansi yang salah satu fungsinya ialah menangani pengawasan dan pengendalian reklame di Kota Depok, memiliki pegawai tetap di bidang pengawasan dan pengendalian (wasdal) sebanyak 17 pegawai dengan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Pegawai bidang pengawasan dan pengendalian (wasdal) Kota Depok
Menurut Pendidikan Tahun 2010

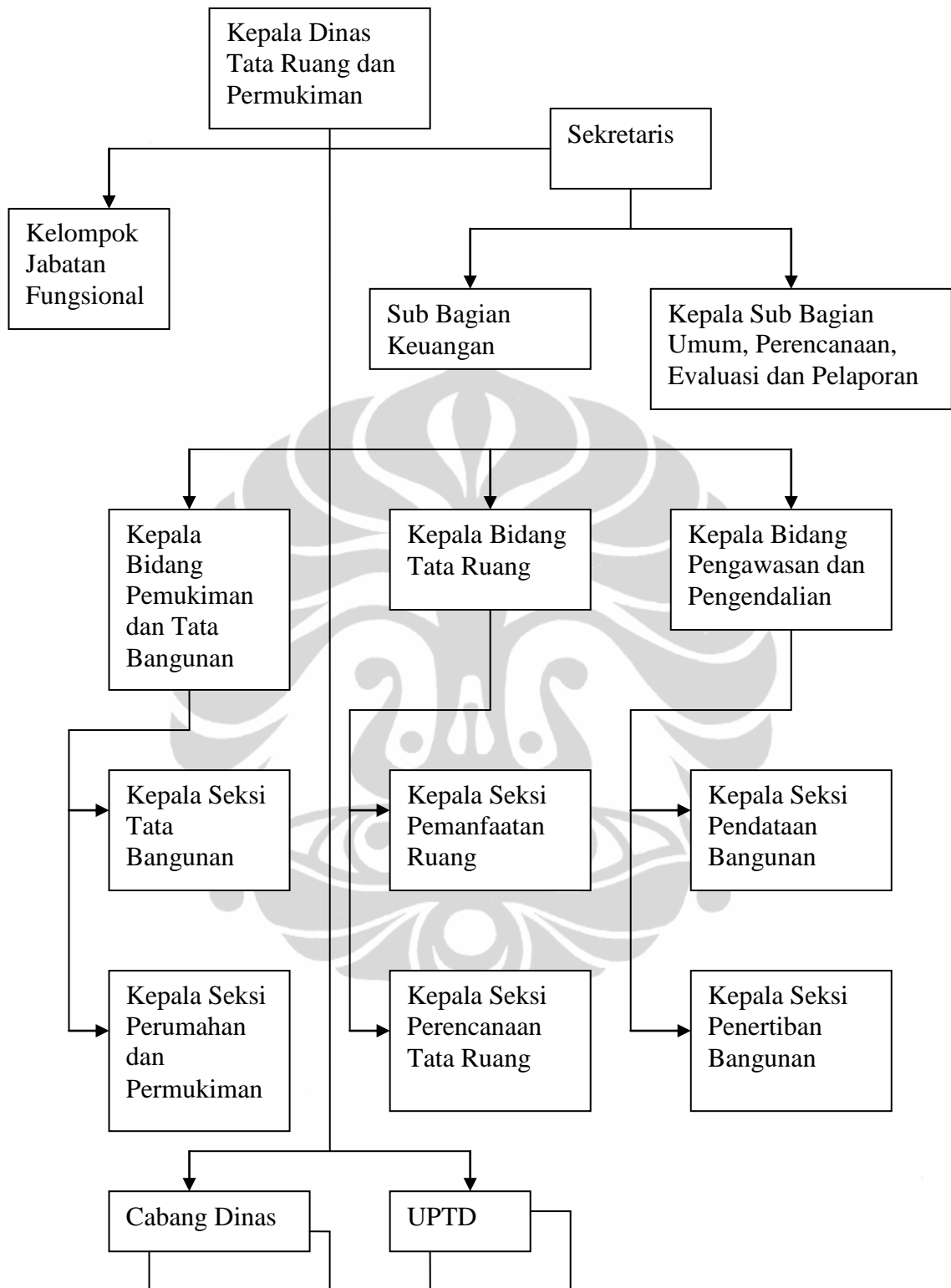
No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	1
2	Strata 1 (S1)	10
3	Diploma (D3)	-
4	SLTA	6

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok

Ketujuh belas pegawai di bidang pengawasan dan pengendalian bertugas mengawasi dan mengendalikan bangunan dan reklame. Dan hanya 5 pegawai yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh reklame di Kota Depok.

Prasarana yang dimiliki oleh bidang wasdal khusus pengawas dan pengendali pajak reklame ialah 1 genset, dan 1 alat tukang.

Struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok ialah:



Gambar 3.3

Struktur Organisasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok